

**PENGARUH SOSIALISASI OPERASI BERSIH  
OLEH PEGAWAI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PROGRAM KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN (K-3)  
DI KECAMATAN GANDRUNGMANGU KABUPATEN CILACAP**

Oleh

**BAMBANG SUPRAYITNO**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan  
FISIP Universitas Galuh Ciamis

**Abstrak**

*Latar belakang penelitian ini adalah masyarakat kurang antusias untuk berpartisipasi dalam program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3). Hal ini terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut: (1) Sulitnya masyarakat untuk diajak bergotong royong dalam melaksanakan Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3), (2) Pada beberapa desa di Wilayah Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap sebagian besar masyarakat kurang peduli akan kebersihan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK), (3) Kurang kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program operasi bersih itu diduga disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang operasi bersih oleh pegawai. Hal ini terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut: (1) Kurangnya komunikasi antara pegawai dengan masyarakat mengenai program operasi bersih, sehingga terkesan tidak penting, (2) Pegawai jarang melakukan kunjungan secara formal untuk melaksanakan sosialisasi, (3) Tidak adanya catatan hasil temuan tentang pelaksanaan sosialisasi baik secara teori maupun aplikasi, sehingga laporan program tidak jelas. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 19 orang pegawai dan 100 orang masyarakat. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, angket). Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diperoleh hasil sebagai berikut : Sosialisasi operasi bersih oleh pegawai sebesar 68,95 %, menunjukkan kategori cukup baik. Partisipasi masyarakat dalam Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) sebesar 67,66 %, menunjukkan kategori cukup baik. Pengaruh sosialisasi operasi bersih oleh pegawai terhadap partisipasi masyarakat dalam program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) sebesar 56,06 % dengan tingkat pengaruhnya kuat. Artinya partisipasi masyarakat dalam Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap dipengaruhi oleh sosialisasi operasi bersih oleh pegawai. Adapun sisanya sebesar 43,94 % merupakan faktor lain yang tidak diteliti seperti kepemimpinan, motivasi dan sebagainya.*

**Kata Kunci : Sosialisasi, Partisipasi, Program**

**PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara berkembang yang saat ini sedang melaksanakan usaha-usaha ke arah terwujudnya suatu keadaan yang lebih baik dan maju dalam berbagai aspek kehidupan bangsa melalui kegiatan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia tersebut adalah pembangunan yang sifatnya terencana dan terus menerus secara multidimensional, yang juga meliputi peningkatan pada pembangunan daerah. Untuk

itu, pemerintah pusat memberikan kewenangan pada masing-masing daerah untuk melaksanakan otonomi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah undang-undang yang mengatur tentang adanya pemberian otonomi kepada daerah. Dalam pelaksanaannya otonomi daerah diserahkan kepada masing-masing daerah Kabupaten dan daerah Kota berdasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas dan bertanggung jawab. Salah satu implikasi dari otonomi daerah tersebut adalah suatu daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan sendiri, untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan

**MODERAT**

Modern dan Demokratis

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pada hakekatnya otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan mendayagunakan potensi yang ada. Dengan mengembangkan potensi yang ada diharapkan dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah dalam rangka untuk pembangunan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah diserahkan kepada daerah Kabupaten dan daerah Kota berdasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas dan bertanggungjawab. Seperti yang disebut dalam Pasal 1 Angka 5 UU No. 32 Tahun 2004 "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, untuk dapat mengurus daerahnya sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing dengan mendayagunakan segala sumber daya yang terdapat di daerah untuk dikelola secara optimal bagi keperluan pembangunan daerahnya.

Kewenangan pemerintah daerah meliputi semua bidang yang ada dalam wilayahnya yang antara lain meliputi penyelenggaraan pembangunan dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Adapun yang termasuk ke dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal masyarakat daerah.

Sementara itu di dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan sebagai berikut :

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota meliputi:
  - a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  - b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
  - c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;

- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertahanan;
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

- (2) Urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan isi undang-undang di atas bahwa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, diantaranya adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal ini sesuai juga dengan rumusan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak".

Dari keseluruhan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, satu diantaranya adalah kegiatan perbaikan lingkungan yang mendapat prioritas tersendiri misalnya dengan dilaksanakannya program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3). Melalui operasi bersih ini pemerintah berusaha untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup masyarakat di Kabupaten Cilacap.

Usaha pemerintah melalui program operasi bersih bertujuan untuk mewujudkan adanya peningkatan kualitas ketertiban, kebersihan, keindahan, bahkan juga kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan operasi bersih ini terutama sangat ditentukan oleh adanya partisipasi masyarakat. Karena itu pemerintah

Pengaruh Sosialisasi Operasi Bersih Oleh Pegawai Terhadap Partisipasi Masyarakat  
dalam Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3)  
di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap  
**BAMBANG SUPRAYITNO**

harus berusaha untuk dapat menumbuhkan kesadaran dan minat masyarakat untuk ikut aktif dalam menciptakan lingkungan hidup yang tertib, bersih dan indah.

Seperti halnya di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, menunjukkan bahwa operasi bersih merupakan salah satu program yang sedang digalakkan, walaupun tidak semua orang mau dan mampu memahami maupun menyadarinya.

Berdasarkan hasil observasi (penjajagan awal) yang penulis lakukan di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, terlihat bahwa masyarakat kurang antusias untuk berpartisipasi dalam program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3). Hal ini terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut :

1. Sulitnya masyarakat untuk diajak bergotong royong dalam melaksanakan Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3), sehingga pelaksanaan program K3 terhambat. Contoh: Banyaknya anggota masyarakat yang masih mementingkan kepentingan pribadi daripada mengikuti kegiatan gotong-royong.
2. Pada beberapa desa di Wilayah Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap sebagian besar masyarakat kurang peduli akan kebersihan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK). Contoh : Beberapa sarana MCK yang biasa digunakan masyarakat terlihat kurang terawat, sehingga dapat menimbulkan wabah penyakit.
3. Kurang kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Contoh: Masih banyak berserakan sampah-sampah di sekitar jalan-jalan atau lokasi yang sering dilalui oleh masyarakat.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program operasi bersih itu diduga disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang operasi bersih oleh pegawai. Hal ini terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut :

1. Kurangnya komunikasi antara pegawai dengan masyarakat, mengenai program operasi bersih, sehingga terkesan tidak penting.
2. Pegawai jarang melakukan kunjungan secara formal untuk melaksanakan sosialisasi, sehingga pegawai itu sendiri

tidak tahu apakah program tersebut telah dilaksanakan oleh masyarakat atau belum.

3. Tidak adanya catatan hasil temuan tentang pelaksanaan sosialisasi baik secara teori maupun aplikasi, sehingga laporan program tidak jelas.

Berdasar latar belakang penelitian di atas, selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sosialisasi operasi bersih oleh pegawai di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap?
3. Adakah pengaruh sosialisasi operasi bersih oleh pegawai terhadap partisipasi masyarakat dalam Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap?

## **LANDASAN TEORITIS**

### **Pengertian Sosialisasi**

Jika didefinisikan sosialisasi adalah merupakan sumber dimana seseorang akan mengetahui bagaimana cara mereka mengetahui lingkungannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa: 'Sosialisasi adalah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungan sekitarnya.'<http://www.slideserve.com/brian/sosialisasi-dan-pembentukan-kepribadian>) tanggal akses 22 Maret 2015.

Horton dan Hunt (Damsar, 2011:151) berpendapat bahwa: 'Sosialisasi sebagai suatu proses dengan mana seseorang menghayati (mendarahdagingkan, internalize) norma-norma kelompok dimana ia hidup sehingga timbullah diri yang unik'. Lebih lanjut Hunt dan White (Damsar, 2011:152) menegaskan bahwa: 'Sosialisasi adalah suatu proses belajar peran, status, dan nilai yang diperlukan untuk keikutsertaan (partisipasi) dalam Institusi sosial'.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua hal penting dalam proses sosialisasi, yaitu: Satu tentang proses, yaitu suatu transmisi pengetahuan, sikap, nilai, norma dan perilaku esensial.

## MODERAT

Modern dan Demokratis

Kedua tentang tujuan, yaitu sesuatu yang diperlukan agar mampu berpartisipasi efektif dalam masyarakat.

### Pengertian Partisipasi

Secara etimologis konsep partisipasi dapat ditelusuri akar katanya dari bahasa Inggris, menurut Damsar (2011:178) yaitu: "Kata *Part* yang berarti bagian". Jika kata *Part* ini dikembangkan menjadi kata kerja, maka kata ini menjadi "*to participate*", yang bermakna turut ambil bagian. Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: "Perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta". Menurut Rahnama (Khairul Muluk, 2005:65) dengan mengutip apa yang diungkapkan dalam the Oxford Dictionary, memulai pembahasannya mengenai partisipasi sebagai 'The action of fact of partaking, having or forming a part of'. Dalam pengertian ini, partisipasi bisa bersifat transitif atau intransitif, bisa pula bermoral atau tak bermoral. Kandungan pengertian tersebut juga bersifat dipaksa atau bebas, dan bisa pula bersifat manipulatif atau spontan.

Gordon (Damsar, 2011:178) menyatakan bahwa :

*The person who participates is ego involved instead of merely taks-involved.* Pendapat itu dapat diterjemahkan dengan kalimat sebagai berikut: Bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja. Dengan keterlibatan dirinya, berarti keterlibatan pikiran dan perasaan. Atau misalnya anda berpartisipasi/ikut serta (dapat anda rasakan sendiri), maka anda melakukan kegiatan itu karena menurut pikiran anda perlu dan bahwa perasaan anda pun menyetujui/berkenan untuk melakukannya. Sementara itu menurut Davis (Damsar,

2011:178) mengemukakan bahwa :

*Participation can be defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them. Selanjutnya ia mengemukakan pula There are three ideas in this definition which are important to managers who will practice the art of*

*participation, most of them do agree on the importance of these three ideas.*

Pendapat tersebut di atas dapat diterjemahkan sebagai berikut :

Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Di dalam pengertian tersebut di atas terdapat tiga buah gagasan yang penting artinya bagi para manager/pemimpin yang hendak menerapkan partisipasi, dan kebanyakan dari mereka sependapat dengan tiga buah gagasan tersebut.

Adapun tiga buah unsur penting dari partisipasi sebagaimana dimaksud oleh Davis (Damsar, 2011:179) yang memerlukan perhatian khusus, yaitu :

1. Bahwa partisipasi / keikutsertaan / keterlibatan / peranserta, sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih daripada semata mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
2. Unsur kedua adalah kesediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompoknya.
3. Unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab. Unsur tersebut merupakan segi yang menonjol dan rasa menjadi anggota. Diakui sebagai anggota artinya ada masa *sense of belongingness*.

Pendapat lain sebagaimana dikemukakan Daryono (Sastropetro, 2000:15) adalah sebagai berikut: 'Partisipasi dalam pembangunan desa menunjukkan bahwa masyarakat desa sampai saat itu belum terlihat sepenuhnya. Partisipasi berarti keterlibatan dalam hal: proses pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan, menunjukkan tujuan dan prioritas'.

### Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *Society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata Bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikutserta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang

saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Menurut Soekanto ([http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%20%20-%20084\\_01244022.pdf](http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%20%20-%20084_01244022.pdf)) tanggal akses 23 Maret 2015, memaparkan bahwa: 'Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia'.

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton (dalam Soekanto) ([http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%20%20-%20084\\_01244022.pdf](http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%20%20-%20084_01244022.pdf)) tanggal akses 23 Maret 2015 bahwa: 'Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas'. Sedangkan masyarakat menurut Selo Soerjono ([http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%20%20-%20084\\_01244022.pdf](http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%20%20-%20084_01244022.pdf)) tanggal akses 23 Maret 2015 adalah: 'Orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan'.

Menurut Durkheim (Taneko, 1984:11) bahwa: 'Masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya'. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah :

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;

4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. (Emile Durkheim dalam Soleman B Taneko, 1984:11).

Lebih lanjut Emile Durkheim (Djuretnaa Imam Muhni, 1994:29-31) mengemukakan bahwa: 'Keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial'. Realitas sosial diartikan sebagai kenyataan yang terjadi di masyarakat, sementara itu kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial di dalam bermasyarakat. Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia. Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama.

#### **Pengaruh Sosialisasi Operasi Bersih Terhadap Partisipasi Masyarakat**

Melalui sosialisasi, seseorang akan mengetahui manfaat suatu program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Setelah itu mereka akan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program tersebut. Dengan demikian maka sosialisasi memiliki pengaruh baik terhadap pelaksanaan partisipasi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pendapat Zandén (Damsar, 2011:152), bahwa: 'Sosialisasi adalah suatu proses interaksi sosial dengan mana seseorang memperoleh pengetahuan, sikap dan perilaku esensial untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat'.

Dengan adanya sosialisasi yang jelas, terencana dan prosedural, maka partisipasi masyarakat akan lebih meningkat. Sebab sejauh ini partisipasi masyarakat kurang, disebabkan karena sosialisasi yang kurang. Artinya masyarakat tidak mengetahui secara jelas apa dan bagaimana operasi bersih itu dilaksanakan, sehingga partisipasinya pun akan berkurang.

Hal ini dianggap wajar mengingat sosialisasi menjadi ujung keberhasilan pelaksanaan partisipasi. Sejahteramana pihak pemerintah mensosialisasikan program yang dibuatnya kepada masyarakat akan berbanding lurus dengan bagaimana partisipasi masyarakat terhadap program tersebut. Dengan kata lain, jika sosialisasi yang dilaksanakan baik maka partisipasinya pun akan baik.

**MODERAT**

Modern dan Demokratis

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian yaitu metode deskriptif. Menurut pendapat Surakhmad (1994:96) pengertian dari metode ini adalah sebagai berikut: "Metode deskriptif merupakan metode yang memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan".

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pegawai dan masyarakat wilayah Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap.

Adapun populasi untuk variabel X (variabel bebas) dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap yang berjumlah 19 orang. Sementara itu populasi untuk variabel Y (variabel terikat) adalah warga masyarakat di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, yang berjumlah 24.760 KK.

Adapun teknik pengambilan sampel untuk variabel X (variabel bebas) yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh atau sampel total (*total sampling*). Sementara itu teknik pengambilan sampel yang digunakan

untuk variabel Y (variabel terikat) adalah *proportional sampel*, artinya pengambilan sampel secara proporsional.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut :

1. Teknik Studi kepustakaan.
2. Teknik Studi lapangan yang terdiri dari teknik observasi, wawancara, dan angket (kuesioner).

Data yang sudah terkumpul melalui teknik pengumpulan data untuk kemudian diolah dengan menempuh langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut :

- a. Menentukan rentang, yaitu dengan cara skor/nilai tertinggi dikurangi skor/nilai terendah.
- b. Menentukan kategori penilaian.
- c. Menentukan Persentase.
- d. Mengukur tingkat pengaruh dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), terlebih dahulu digunakan perhitungan *Koefisien Korelasi Product Moment*.
- e. Menghitung *Koefisien Determinasi* untuk mengetahui besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

**PEMBAHASAN****Analisis Sosialisasi Operasi Bersih Oleh Pegawai di Kantor Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap**

Setelah melakukan pembahasan terhadap setiap data indikator variabel X (sosialisasi oleh pegawai) yang diperoleh melalui penjelasan angket, akhirnya hasil pembahasan tersebut dapat di rekapitulasikan pada tabel berikut :

**TABEL REKAPITULASI HASIL JAWABAN RESPONDEN TERHADAP INDIKATOR SOSIALISASI OPERASI BERSIH OLEH PEGAWAI DI KECAMATAN GANDRUNGMANGU KABUPATEN CILACAP (VARIABEL X)**

No	Indikator	Skor	%	Kategori
1	Pegawai melakukan pengenalan Program Operasi Bersih kepada masyarakat	66	69,47	Cukup Baik
2	Pegawai memberikan penjelasan tentang Program Operasi Bersih kepada masyarakat	57	60,00	Cukup Baik
3	Pegawai melakukan kunjungan secara formal untuk mengetahui apakah Program tersebut telah dilaksanakan oleh masyarakat atau belum	67	70,53	Cukup Baik
4	Pegawai melakukan kunjungan secara informal untuk mengetahui apakah Program tersebut telah dilaksanakan oleh masyarakat atau belum	65	68,42	Cukup Baik
5	Masyarakat dan pegawai melakukan kegiatan Operasi Bersih dengan cara bersama sama membersihkan jalan	63	66,32	Cukup Baik

Pengaruh Sosialisasi Operasi Bersih Oleh Pegawai Terhadap Partisipasi Masyarakat  
dalam Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3)  
di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap  
**BAMBANG SUPRAYITNO**

6	Pegawai bersama masyarakat bergotong royong membersihkan lingkungan disekitar tempat tinggal masyarakat	65	68,42	Cukup Baik
7	Pegawai mencatat hasil temuan dilapangan	73	76,84	Baik
8	Pegawai bersama dengan masyarakat membahas hasil temuan	64	67,37	Cukup Baik
9	Pegawai menyusun laporan tertulis hasil pengamatan	69	72,63	Cukup Baik
10	Pegawai menyusun laporan tertulis hasil wawancara	66	69,47	Cukup Baik
Jumlah		655	68,95	Cukup Baik
Rata-rata		65,50		

Sumber : Hasil penelitian, 2015

Berdasarkan tabel kategori tingkatan pelaksanaan menurut Arikunto, besar persentase 68,95 % menunjukkan kategori cukup baik. Artinya pelaksanaan sosialisasi operasi bersih oleh pegawai di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap telah cukup sesuai dengan proses sosialisasi sebagaimana dikemukakan oleh (Ruslan, 2005:18).

Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi operasi bersih oleh pegawai di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan indikator-indikator yang telah dijadikan acuan. Dimana sosialisasi yang baik adalah yang melaksanakan sosialisasi sesuai dengan prosedur pelaksanaan sosialisasi, mulai dari pengenalan, pelaksanaan kunjungan, pelaksanaan kegiatan khusus, mendiskusikan temuan, dan menyusun laporan hasil sosialisasi.

Hasil di atas sesuai dengan pendapat tentang sosialisasi menurut Wright (Sutaryo, 2005:156) yang mengemukakan sebagai berikut:

Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain.

Sosialisasi merupakan proses belajar, pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Berger (Sutaryo, 2005:156) bahwa: 'Sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat'.

Sosialisasi pada dasarnya adalah "Penyebarluasan informasi (program, kebijakan, peraturan) dari satu pihak (pemilik program, kebijakan, peraturan) kepada pihak-pihak lain (aparatur, masyarakat yang terkena program, dan masyarakat umum). Isi informasi yang disebarluaskan bermacam-macam tergantung pada tujuan program" (Ruslan, 2005:17). Lebih lanjut Suprpto (2008:12-13) menambahkan bahwa: "Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat".

Lebih lanjut Ruslan (2005:18) menjelaskan bahwa: "Proses sosialisasi dapat dibagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut: 1) pengenalan pada masyarakat pengguna, 2) kunjungan-kunjungan, 3) melaksanakan kegiatan khusus, 4) mendiskusikan temuan, dan 5) menyusun laporan".

**MODERAT**

Modern dan Demokratis

**Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap**

Setelah melakukan pembahasan terhadap setiap data indikator variabel Y (partisipasi masyarakat) yang diperoleh melalui penjelasan angket, akhirnya hasil pembahasan tersebut dapat direkapitulasikan pada tabel berikut :

**TABEL REKAPITULASI HASIL JAWABAN RESPONDEN  
TERHADAP INDIKATOR PARTISIPASI MASYARAKAT  
(VARIABEL Y)**

No	Indikator	Skor	%	Kategori
1	Masyarakat ikut menyumbangkan pendapatnya tentang pelaksanaan Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3)	341	68,20	Cukup Baik
2	Masyarakat ikut memberikan pandangannya tentang waktu pelaksanaan Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3)	340	68,00	Cukup Baik
3	Masyarakat memberikan sebagian hartanya dalam bentuk makanan untuk mendukung pelaksanaan Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3)	334	66,80	Cukup Baik
4	Masyarakat memberikan sebagian uangnya untuk mendukung pelaksanaan Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3)	331	66,20	Cukup Baik
5	Masyarakat ikut menyumbangkan tenaganya dalam mendukung pelaksanaan Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3)	357	71,40	Cukup Baik
6	Masyarakat ikut bergotong royong melaksanakan Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3)	334	66,80	Cukup Baik
7	Masyarakat ikut berkumpul dalam perencanaan program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3)	326	65,20	Cukup Baik
8	Masyarakat ikut berkumpul dalam pelaksanaan program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3)	334	66,80	Cukup Baik
9	Masyarakat secara konsisten melaksanakan program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) setiap hari Jum'at	343	68,60	Cukup Baik
10	Masyarakat secara konsisten melaksanakan program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) dengan bergotong royong	343	68,60	Cukup Baik
Jumlah		3.383		
Rata-rata		338,30	67,66	Cukup Baik

Sumber : Hasil penelitian, 2015

Berdasarkan tabel kategori tingkatan pelaksanaan menurut Arikunto, besar persentase 67,66% menunjukkan kategori cukup baik. Artinya partisipasi masyarakat dalam program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) telah cukup sesuai dengan bentuk-bentuk partisipasi Bryan dan White dalam Ndraha (2003:51).

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap

dilaksanakan dengan cukup sesuai dengan indikator-indikator yang telah dijadikan acuan. Dimana partisipasi masyarakat yang baik adalah yang melaksanakan partisipasi sesuai dengan bentuk-bentuk partisipasi, seperti partisipasi buah pikiran, partisipasi harta dan uang, partisipasi tenaga atau gotong-royong, partisipasi sosial, dan Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten.

Hasil di atas sesuai dengan pendapat Sutarto (2000:56) adalah sebagai berikut :



Turut sertanya seseorang baik secara langsung maupun emosional untuk memberikan sumbangan-sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan-persoalan di mana keterlibatan pribadi seseorang yang bersangkutan melaksanakan akan tanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut. Pengertian tersebut menekankan pada keikutsertaan seseorang dalam proses pengambilan keputusan.

Adapun menurut Djalal dan Supriadi (2001:201-202), dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa :

Pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Sementara itu Davis (Sastropetro, 2000:13) mengungkapkan bahwa:

*Participation can be defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them. Selanjutnya ia mengemukakan pula There are three ideas in this definition which are important to managers who will practice the art of participation, most of them do agree on the importance of these three ideas.* Pendapat tersebut di atas dapat diterjemahkan sebagai berikut: Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Di dalamnya terdapat tiga buah gagasan yang penting artinya bagi para manager/pemimpin yang hendak menerapkan suatu partisipasi dan kebanyakan dari mereka sependapat dengan tiga buah gagasan tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka jelas bahwa partisipasi merupakan salah satu bentuk keikutsertaan yang dilakukan

masyarakat dalam pelaksanaan program yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Jenis partisipasi dikemukakan oleh Bryan dan White dalam Ndraha (2003:51) bahwa: 'Partisipasi dapat berbentuk: (1) Partisipasi buah pikiran; (2) Partisipasi harta dan uang; (3) Partisipasi tenaga atau gotong-royong; (4) Partisipasi sosial; dan (5) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten'. Sedangkan dimensi partisipasi masyarakat menurut Oakley (Sajoto, 2003:24) adalah sebagai berikut: '(1) kontribusi masyarakat; (2) pengorganisasian masyarakat; dan (3) pemberdayaan masyarakat.

### Analisis Pengaruh Sosialisasi Operasi Bersih Oleh Pegawai Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap

Untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Operasi Bersih oleh Pegawai terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, dapat diketahui melalui perhitungan koefisien korelasi. Adapun hasil dari perhitungan tersebut adalah sebagai berikut :

$$X = 655$$

$$Y = 3383$$

$$\Sigma X^2 = 19260.75$$

$$\Sigma Y^2 = 3912.11$$

$$\Sigma xy = 6499.35$$

$$r_{xy} = \frac{\Sigma xy}{\sqrt{(\Sigma X^2)(\Sigma Y^2)}}$$

$$r_{xy} = \frac{6499.35}{\sqrt{(19260.75)(3912.11)}}$$

$$r_{xy} = \frac{6499.35}{\sqrt{75350172.7}}$$

$$r_{xy} = \frac{6499.35}{8680.448}$$

$$r_{xy} = 0.749$$

Dari perhitungan korelasi tersebut diperoleh skor korelasi product moment sebesar 0,749, selanjutnya untuk dapat memberikan interpretasi seberapa kuat hubungan antara

kedua variabel tersebut, maka dapat dipergunakan pedoman dari Sugiyono (2001:149). Koefisien korelasi yang ditemukan yakni sebesar 0,749 termasuk dalam kategori kuat. Jadi terdapat hubungan yang kuat dari Sosialisasi Operasi Bersih Oleh Pegawai terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3).

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sosialisasi Operasi Bersih oleh Pegawai terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3), digunakan perhitungan *Koefisien Determinasi*, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} r &= 0.749 \\ KD &= (r_{xy})^2 \times 100 \% \\ &= (0.749)^2 \times 100 \% \\ &= 0.5606 \times 100 \% \\ &= 56.06 \% \end{aligned}$$

Selanjutnya hasil koefisien determinasi tersebut dibandingkan dengan kriteria menurut Jalaludin Rahmat (1995:90), skor Koefisien Determinasi tersebut termasuk tingkat pengaruhnya kuat. Jadi koefisien determinasi adalah 0.5606, artinya 56,06% Partisipasi Masyarakat dalam Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) di Kecamatan Gandrungmangu dipengaruhi oleh Sosialisasi Operasi Bersih oleh Pegawai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh Sosialisasi Operasi Bersih oleh Pegawai terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) di Kecamatan Gandrungmangu sebesar 56,06%, sedangkan sisanya sebesar 43,94% merupakan faktor lain yang tidak diteliti seperti kepemimpinan, motivasi dan sebagainya.

Melalui sosialisasi, seseorang akan mengetahui manfaat suatu program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Setelah itu mereka akan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program tersebut. Dengan demikian maka sosialisasi memiliki pengaruh baik terhadap pelaksanaan partisipasi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pendapat Zanden (Damsar, 2011:152) bahwa, 'Sosialisasi adalah suatu proses interaksi sosial dengan mana seseorang memperoleh pengetahuan, sikap dan perilaku esensial untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat'.

Dengan adanya sosialisasi yang jelas, terencana dan prosedural, maka partisipasi masyarakat akan lebih meningkat. Sebab sejauh ini partisipasi masyarakat kurang, disebabkan karena sosialisasi yang kurang. Artinya masyarakat tidak mengetahui secara jelas apa dan bagaimana operasi bersih itu dilaksanakan, sehingga partisipasinya pun akan berkurang.

Hal ini dianggap wajar mengingat sosialisasi menjadi ujung keberhasilan pelaksanaan partisipasi. Sejujukan mana pihak pemerintah mensosialisasikan program yang dibuatnya kepada masyarakat akan berbanding lurus dengan bagaimana partisipasi masyarakat terhadap program tersebut. Dengan kata lain, jika sosialisasi yang dilaksanakan baik maka partisipasinya pun akan baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang sosialisasi operasi bersih oleh pegawai terhadap partisipasi masyarakat dalam Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sosialisasi operasi bersih oleh pegawai di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, termasuk kategori baik. Hal ini terbukti dengan diperolehnya jumlah total skor hasil angket sebesar 655. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 65,50. Jika dipersentasekan sebesar 68,95 % menunjukkan tingkat sosialisasi dengan kategori cukup baik. Berdasarkan hasil observasi terlihat bahwa pelaksanaan sosialisasi operasi bersih oleh pegawai di Kantor Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, cukup dilaksanakan dengan baik sesuai dengan proses sosialisasi sebagaimana dikemukakan oleh Ruslan (2005:18). Sedangkan dari hasil wawancara diperoleh jawaban bahwa pada dasarnya setiap indikator pelaksanaan sosialisasi telah dilaksanakan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih maksimal.
2. Partisipasi masyarakat dalam Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, termasuk kategori sedang. Hal ini terbukti dengan

Pengaruh Sosialisasi Operasi Bersih Oleh Pegawai Terhadap Partisipasi Masyarakat  
dalam Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3)  
di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap  
**BAMBANG SUPRAYITNO**

diperolehnya jumlah total skor hasil angket sebesar 3.383. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 338,30. Jika dipersentasekan sebesar 67,66 % menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dengan kategori cukup baik.

Berdasarkan hasil observasi terlihat bahwa Partisipasi masyarakat dalam Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap cukup sesuai dengan bentuk-bentuk partisipasi menurut Bryan dan White dalam Ndraha (2003:51).

Sedangkan dari hasil wawancara diperoleh jawaban bahwa pada dasarnya setiap indikator partisipasi masyarakat telah dilaksanakan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih maksimal.

3. Pengaruh sosialisasi operasi bersih oleh pegawai terhadap partisipasi masyarakat dalam Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap sebesar 56,06 % dengan tingkat pengaruhnya kuat. Artinya partisipasi masyarakat dalam Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap dipengaruhi oleh sosialisasi operasi bersih oleh pegawai. Adapun sisanya sebesar 43,94 % merupakan faktor lain yang tidak diteliti seperti kepemimpinan, motivasi dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan oleh pegawai cukup mempengaruhi partisipasi masyarakat.

#### **Saran**

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sosialisasi operasi bersih oleh pegawai terhadap partisipasi masyarakat dalam Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap memiliki tafsiran koefisien korelasi yang kuat, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan peningkatan sosialisasi dan partisipasi :

1. Supaya sosialisasi Operasi Bersih dapat dilaksanakan dengan baik, maka cara lain yang dapat ditempuh adalah :
  - a. Pegawai hendaknya melaksanakan kunjungan langsung kepada masyarakat

agar dapat mengetahui keberhasilan program tersebut.

- b. Pegawai hendaknya memberikan penjelasan tentang program yang akan digalakan saat itu agar masyarakat mengetahuinya dengan jelas.
  - c. Pegawai hendaknya membuat langkah kerja yang jelas yang harus dilakukan dalam proses sosialisasi.
2. Supaya partisipasi masyarakat lebih meningkat, maka perlu dilakukan pula kegiatan-kegiatan lain sebagai berikut :
    - a. Pegawai memberikan penjelasan mengenai sumbangan dalam bentuk uang dengan jelas kepada masyarakat, dan kemana akan digunakannya uang tersebut.
    - b. Pegawai hendaknya terjun langsung dengan masyarakat bersama-sama membersihkan lingkungan sekitar.
  3. Karena sosialisasi berpengaruh pada partisipasi masyarakat, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut :
    - a. Pegawai hendaknya melaksanakan kunjungan langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui manfaat program yang disampaikan dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya.
    - b. Pegawai hendaknya terjun langsung melaksanakan program operasi bersih agar masyarakat ikut berperan di dalamnya. Artinya pegawai tidak hanya sekedar memberi tahu, tapi juga memberi contoh.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-Buku**

- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- , 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi IV. Jakarta: Rincka Cipta.
- Damsar. 2011. *Pengantar Sosiologi Politik*. Padang: Kencana Media Grup
- Djalal dan Supriadi. 2001. *Perubahan Sosial Dan Pembangunan*. Jakarta: Widia Sarana Indonesia.
- Djuretnaa Imam Muhni. 1994. *Teori Komunikasi Masa*. Jakarta: Grasindo.

- Taneko. 1984. *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Ligth, et al. 1989. *Power and privilege. A Theory Of Social Stratification*. New York: McGraw.Hill.
- Nazir, Moh. 1983. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Organisasi Dan Pengorganisasian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rush dan Allthof. 2002. *Efektif Public Relation*. English” Word Clifs.
- Ruslan, 2005. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Bandung: Gramedia.
- Sajoto. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gajahmada Unipress.
- Sastropoetro, Santoso. 2000. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi Dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Sudjana, Nana. 1982. *Penilaian Dan Penelitian Pendidikan*. Bandung.
- Sugiyah. 2010. *Propaganda Salah Satu Komunikasi Masa*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukardi. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi aksara.
- Suprpto. 2008. *Dasar-Dasar Perilaku Organisasi*. Jogjakarta: UII Press.
- Surakhmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Sutaryo. 2005. *Psikology Sosial*. Bandung: Ercsco.

#### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

#### **Sumber Lain**

Sockanto. (<http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%202%20-%2008401244022.pdf>). (<http://studihukum.blogspot.com/2011/01/urgensi-partisipasi-publik-dalam-11.htmlv>) tanggal akses 22 Maret 2015.

WikipediaIndonesia.melalui[http://id.wikipedia.org/wiki/sosialisasi\[13/07/2009\].http://www.slideserve.com/brian/sosialisasi-dan-pembentukan-kepribadian](http://id.wikipedia.org/wiki/sosialisasi[13/07/2009].http://www.slideserve.com/brian/sosialisasi-dan-pembentukan-kepribadian)) tanggal akses 22 Maret 2015.